

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Etny Sirenden¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Muh. Rafiy²⁾ dan Irmawatty Paula Tamburaka²⁾

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo

ABSTRAK

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pengangguran dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Prov. Sulawesi Tenggara dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk time series dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015. Variabel yang digunakan meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Inflasi dan Pengangguran. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Ordinary Least Square (OLS), dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan SPSS 16.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin; (2) upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin; (3) pengangguran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin; dan (4) inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kata Kunci : Jumlah Penduduk Miskin, pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum, pengangguran, inflasi

1. PENDAHULUAN

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan, untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau PDB. Oleh karena itu salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektifitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti bahwa salah satu kriteria utama pemilihan sektor inti atau sektor andalan dalam pembangunan nasional adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Saktyanu; 2003)

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya melakukan kebijakan dan program – program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari pokok permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil

yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Pada hakekatnya pembangunan daerah dilanjutkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. (Wongdesmiwati 2009).

Tingginya persentase penduduk miskin disuatu wilayah akan berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini karena umumnya pendapatan penduduk miskin tersebut sangat rendah sehingga dari segi pendapatan perkapita juga rendah, apalagi rata-rata jumlah anggota rumah tangga penduduk miskin umumnya lebih banyak dari rumah tangga penduduk tidak miskin sehingga rata-rata pendapatan perkapita penduduk tersebut relative lebih rendah. Keadaan ini akan lebih parah lagi jika tingkat pengangguran diwilayah tersebut juga tinggi.

Berdasarkan data dari BPS Sulawesi Tenggara bahwa kemiskinan di Sulawesi Tenggara selama 10 tahun terakhir terus menurun. Angka kemiskinan di Sultra pada tahun 2005 sebesar 450,5 ribu jiwa dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 465,4 ribu jiwa dan selanjutnya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 angka kemiskinan dapat di tekan ditataran angka 321,9 ribu jiwa.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sulawesi Tenggara”**.

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran dan Inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Adapun berbagai pendapat yang mengemukakan tentang kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Definisi kemiskinan menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) Badan Program Pembangunan adalah ketidak mampuan untuk memperluas kebutuhan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Bank Dunia membantu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengukur kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin. Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

World Bank (2010) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan keterampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian dan lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak – hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset – aset diatas merupakan penyebab seseorang masuk dalam kemiskinan.

Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara – negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut :

- 1) Tingkat pendapatan nasional negara – negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan perkapita negara – negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- 3) Distribusi sangat timpang atau sangat tidak merata.
- 4) Mayoritas penduduk di negara – negara berkembang harus di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas.
- 6) Fasilitas pendidikan isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk digolongan penduduk miskin (*growth with equity*).

Banyak penelitian yang membuktikan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2009), juga menghasilkan hal yang sama dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam usaha pengentasan kemiskinan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Hubungan Upah Minimum dengan kemiskinan

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkat pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman, 2000).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 , tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa mengesampingkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Hubungan Pengangguran dengan kemiskinan

Lincolind Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya.

Menurut (Sukirno; 2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dapat dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Menurut (Dian Octaviani, 2001), mengatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan

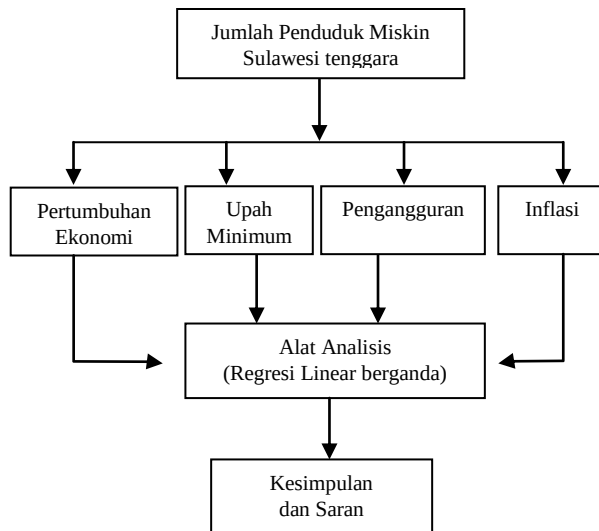
Menurut teori Keynes (Nugroho; 2012), inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan masyarakat sehingga proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*).

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Fatma (2005) hubungan antara inflasi dan kemiskinan dapat diterangkan dengan dua cara. Pertama, inflasi mengakibatkan nilai riil dari uang yang dipegang menjadi turun. Ketika harga meningkat, uang untuk membeli lebih sedikit (daya beli menjadi turun). Kedua, inflasi mengakibatkan bunga riil yang diperoleh dari menyimpan uang di bank menjadi turun sehingga daya beli menjadi turun. Turunnya daya beli ini mengakibatkan masyarakat menjadi lebih miskin dari sebelumnya.

Kerangka Konsep

Kerangka teoritis yang menunjukkan hubungan antara jumlah penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, upah minimum dan inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti gambar dibawah ini.



Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara.
- 2) Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara.
- 3) Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara.
- 4) Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Lokasi Penelitian dilakukan di Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2017

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis variabel, yaitu :

- Variabel bebas (independent variable), yaitu Jumlah Penduduk Miskin
- Variabel terikat (dependent variable), yaitu terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran dan Inflasi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series, dari tahun 2005 sampai tahun 2015 yang merupakan data Prov. Sultra.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisa ekonometrika, yaitu meregresikan variabel-variabel yang ada dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisa statistik, yaitu persamaan regresi linear berganda.

Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Kemudian fungsi diatas ditransformasikan ke dalam model ekonometrika dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = X_2^{\beta_2} \cdot e^{(\beta_0 + X_1^{\beta_1} + X_3^{\beta_3} + X_4^{\beta_4})} + \mu$$

Kemudian dilakukan transformasi data kedalam bentuk logaritma (Log), dikarenakan ada perbedaan satuan diantara variabel – variabel, kemudian persamaan diatas dilinearkan menjadi sebagai berikut :

$$\text{Log} Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log} X_1 + \beta_2 \text{Log} X_2 + \beta_3 \text{Log} X_3 + \beta_4 \text{Log} X_4 + \mu$$

Keterangan:

LogY	= Jumlah penduduk miskin
β_0	= Intercept
LogX ₁	= Pertumbuhan Ekonomi
LogX ₂	= Upah Minimum
LogX ₃	= Pengangguran
LogX ₄	= Inflasi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
μ_t	= Error Term

Definisi Operasional Variabel

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
2. Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya perubahan atau penambahan pendapatan nasional dalam PDB pada harga konstan.
3. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
4. Pengangguran yaitu, istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Inflasi yaitu, besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode waktu tertentu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Regresi Berganda

Berikut ini akan disajikan hasil regresi antara pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pengangguran dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.13 Hasil Regresi Linear berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.460	.844		11.205	.000		
	LogX1	-.368	.160	-.382	-2.296	.041	.533	1.876
	LogX2	-.582	.115	-1.239	-5.074	.002	.247	4.049
	LogX3	.028	.098	.059	.281	.788	.333	3.004
	LogX4	-.136	.049	-.543	-2.797	.031	.391	2.559
a. Dependent Variable: LogY								

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yaitu :

$$Y = 9.460 + (-0,368) + (-0,582) + 0,028 + (-0,136) + \mu$$

Berdasarkan Tabel diatas yakni hasil olahan data regresi dengan menggunakan SPSS 16.0, maka selanjutnya akan dapat disajikan hasil pengujian regresi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara tahun 2005 – 2015

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,368 terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara tahun 2005 sampai 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Artinya apabila terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,368%.

Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan sesuai dengan harapan adanya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*), dimana tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal ini dilandasi pada teori trickle-down effect yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (dalam jurnal Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, 2010: 46) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara tahun 2005 – 2015

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,582 terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara tahun 2005 sampai 2015. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan

di Sulawesi Tenggara. Artinya apabila terjadi peningkatan terhadap upah minimum sebesar 1% maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,582%.

Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman dalam Agus Adit Prastyo, 2010).

Kesejahteraan buruh/pekerja disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan buruh/pekerja sehingga tingkat kesejahteraan buruh/pekerja tersebut meningkat. Kesejahteraan yang meningkat menyebabkan produktivitas kerja meningkat dan keuntungan perusahaan menjadi bertambah. Kenaikan UMP tersebut akan menguntungkan pihak buruh/pekerja dan pengusaha karena adanya produktivitas kerja yang meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara tahun 2005 – 2015

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan dengan koefisien positif sebesar 0,028 hal ini menunjukkan bahwa pengangguran mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara.

Tingkat pengangguran di Sulawesi Tenggara mempunyai pengaruh yang tidak signifikan hal ini disebabkan karena banyak orang yang menganggur dalam sebuah rumah tangga, tetapi ada anggota rumah tangga yang lain yang bekerja dengan tingkat pendapatan tinggi sehingga cukup untuk menyokong kehidupan anggota keluarga yang masih menganggur. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Endrayani dkk (dalam jurnal Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2016)

Kondisi tersebut banyak ditemui di daerah perkotaan. Pada saat kelompok bukan angkatan kerja (pelajar/mahasiswa) menamatkan pendidikan dan masuk dalam kelompok angkatan kerja, tetapi tidak serta merta langsung bekerja, terkadang masa tunggu mendapatkan pekerjaan relatif lama. Selain itu ada juga yang sengaja menarik diri dari dunia kerja karena alasan mencari pekerjaan lebih baik.

Menurut hasil penelitian Godfrey dalam Wijayanto, RD (2010) yaitu bahwa kemiskinan mungkin tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Selain itu juga diperkuat dengan pendapat Lincoln Arsyad (1997) yang menyatakan bahwa salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya.

Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara tahun 2005 – 2015

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,136 terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara tahun 2005 sampai 2015. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara. Artinya apabila terjadi peningkatan terhadap inflasi sebesar 1% maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,136%.

Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak selamanya memberikan pengaruh yang negatif. Pada beberapa kondisi (kondisi inflasi lunak), inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi pada tingkat dibawah 4% dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya.

Korelasi negatif antara inflasi dan jumlah penduduk miskin diperkuat oleh penelitian Latif Kharie (2007) inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan suatu wilayah. Suatu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan diantara kelompok penerimaan pendapatan dipastikan dapat meningkatkan daya beli kolektif, meningkatkan pengeluaran konsumsi perkapita, sehingga mengurangi jumlah penduduk miskin atau menurunkan tingkat kemiskinan penduduk suatu negara.

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara.
2. Variabel Upah Minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara.
3. Variabel Pengangguran mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara.
4. Variabel Inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara

Saran

1. Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal ini membutuhkan campur tangan pemerintah dan partisipasi swasta secara signifikan.
2. Dalam penentuan jumlah upah minimum provinsi pemerintah harus menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja sehingga tingkat kemiskinan dapat berkurang.
3. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara lebih menggerakkan sektor informal. Karena sektor informal merupakan salah satu solusi masalah dalam mengatasi pengangguran.
4. Pengendalian inflasi wajib dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat sehingga peningkatan pendapatan yang diperolehnya menjadi lebih berarti dalam memenuhi kebutuhan dasar atau meningkatkan kualitas hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BP STIE, YKPN.
- Fatma, F. S. (2005). *Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Depok: Tesis Magister Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kakwani, N dan Son, HH. (2003). *Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies*. The Pakistan Development Review, 42: 4 Part 1 pp 417-444.
- Kaufman, B. (2000). *The Economics of Labour Markets, Fifth Edition*. New York: The Dryden Press.

- Ketut Endrayani dan Made Urmila Dewi. (2016). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Unud* 5.1 , 84.
- Kharie, L. (2007). Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan kemiskinan di Indonesia : 1976 - 2005. *Vol 1 / No. 1 , Cita Ekonomika* .
- Nugroho, P. W. (2012). *Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia*. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Octaviani, D. (2001). Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke. *Media Indonesia Vol. 7, no. 8* , 100 - 118.
- Prastyo, A. A. (2010). *Faktor - faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah: 2003 - 2008*. Semarang: Skripsi FIEB UNDIP.
- Ranis, G dan Fei, JG. (1968). *Assistance and Economic Development: Comment*. American Economic Review, LVIII (4).
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 10 (1)* .
- Simatupang, Pantjar dan Saktyanu K. Dermoredjo. (2003). Produk Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan. *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia* , 191 - 324, Vol. 51, No. 3.
- Siregar, H dan D. Wahyuniarti. (2007). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Bogor: MB - IPB.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Todaro, M.P and S.C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi . Jilid 1. Edisi 9*. Jakarta: Erlangga.
- Wijayanto, R. D. (2010). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah tahun 2005 - 2008*. Semarang: Skripsi FE Universitas Diponegoro.
- Wongdesmiwati. (2009). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengantasan Kemiskinan di Indonesia tahun 1990 - 2004 : Analisis Ekonometrika. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* .
- World Bank. (2004). *Mewujudkan Pelayanan Umum Bagi Masyarakat Miskin*. Jakarta: The World Bank.